ISLAMICA : Journal Of Islamic Education Research

E-ISSN: 3090-773X

Editorial Address: Jl. Rawa Sakti, Tibang Syiah Kuala, Banda Aceh

Received: 02-05-2026 | **Accepted:** 03-06-2026 **Published:** 01-08-2026

PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBENTUK KARAKTER KEWARGANEGARAAN DIGITAL (*DIGITAL CITIZENSHIP*) MAHASISWA

Lisma Wati[1], Ilham[2], Jasmadi[3], Husna Ulia[4]

[1,2,4]Universitas Abulytama Aceh

[3]Universitas Al Washliyah Darussalam Banda Aceh

Email: lisma_ppkn@abulyatama.ac.**id**[1], iilham_ppkn@abulyatama.ac.id[2].
jasmadi@unadabna.ac.id[3], husnaulia18@gmail.com[4]

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong lahirnya demokrasi digital sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi melalui media digital. Mahasiswa sebagai generasi muda dan kelompok intelektual memiliki peran penting dalam memanfaatkan teknologi digital untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, serta berpartisipasi dalam berbagai isu sosial dan politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aktivitas politik mahasiswa di media sosial, pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan terhadap partisipasi digital, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan demokrasi digital. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan mengkaji berbagai literatur, jurnal ilmiah, buku, dan sumber referensi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi sarana utama bagi mahasiswa dalam memperoleh informasi politik, menyampaikan pendapat, mengikuti diskusi publik, dan berpartisipasi dalam berbagai gerakan sosial. Pendidikan Kewarganegaraan berperan penting dalam meningkatkan partisipasi digital melalui penguatan literasi digital, kemampuan berpikir kritis, kesadaran hukum, serta penanaman nilai-nilai demokrasi dan etika digital. Namun, demokrasi digital juga menghadapi berbagai tantangan seperti penyebaran hoaks, disinformasi, polarisasi politik, rendahnya literasi digital, ujaran kebencian, serta masalah keamanan dan privasi data. Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan perlu terus dikembangkan agar mampu membentuk mahasiswa sebagai warga negara digital yang aktif, kritis, bertanggung jawab, dan mampu berpartisipasi secara konstruktif dalam kehidupan demokrasi di era digital.

Kata Kunci: *Pendidikan Kewarganegaraan, Kewarganegaraan Digital, Partisipasi Mahasiswa.*

Abstract

The development of information and communication technology has encouraged the birth of digital democracy as a form of community participation in democratic life through digital media. Students as the young generation and intellectual group have an important role in utilizing digital technology to obtain information, convey aspirations, and participate in various social and political issues. This research aims to analyze student political activity on social media, the influence of Citizenship Education on digital participation, and the challenges faced in implementing digital democracy. The method used is library research by reviewing various literature, scientific journals, books and relevant reference sources. The research results show that social media has become the main means for students to obtain political information, express opinions, participate in public discussions, and participate in various social movements. Citizenship education plays an important role in increasing digital participation through strengthening digital literacy, critical thinking skills, legal awareness, as well as instilling democratic values and digital ethics. However, digital democracy also faces various challenges such as the spread of hoaxes, disinformation, political polarization, low

digital literacy, hate speech, and data security and privacy issues. Therefore, Citizenship Education needs to continue to be developed in order to be able to form students as digital citizens who are active, critical, responsible, and able to participate constructively in democratic life in the digital era.

Keywords: *Citizenship Education, Digital Democracy, Student Participation.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat modern. Internet dan media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga telah mengubah pola interaksi sosial, ekonomi, budaya, dan politik masyarakat. Kehadiran teknologi digital memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi secara cepat, menyampaikan pendapat, serta berpartisipasi dalam berbagai aktivitas publik tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kondisi ini melahirkan konsep baru yang dikenal sebagai demokrasi digital[1].

Demokrasi digital merupakan bentuk pelaksanaan nilai-nilai demokrasi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai media partisipasi masyarakat. Melalui berbagai platform digital, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, berdiskusi mengenai kebijakan publik, mengawasi jalannya pemerintahan, serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Demokrasi digital memberikan peluang yang lebih luas bagi warga negara untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan demokrasi dibandingkan dengan demokrasi konvensional yang lebih terbatas oleh faktor geografis dan akses informasi.[2]

Di Indonesia, perkembangan demokrasi digital semakin terlihat dengan meningkatnya penggunaan internet dan media sosial di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan merupakan salah satu kelompok yang paling aktif memanfaatkan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Media sosial menjadi ruang bagi mahasiswa untuk memperoleh informasi, berdiskusi mengenai isu-isu sosial dan politik, menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, serta membangun gerakan sosial yang bertujuan mendorong perubahan positif di masyarakat[3].

Partisipasi mahasiswa dalam ruang digital menunjukkan bahwa teknologi telah membuka kesempatan yang lebih luas untuk memperkuat demokrasi. Berbagai isu publik

[1] Nurmansyah, C. A., Juwono, M. P., & Khairiyah, N. (2026). Literasi Digital Dan Transformasi Kesadaran Kewarganegaraan Mahasiswa Dalam Ekosistem Demokrasi Digital. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(2), 6880-6891.

[2] Kothen, S. T. G., Sae, B. S., Ora, I. S., & Toga, T. K. H. (2025). Penguatan literasi kewarganegaraan melalui pendidikan politik di kalangan mahasiswa PPKn. *Paedagogie*, *20*(2), 383-392.

[3] Wibowo, I., Noe, W., Mas' ud, F., & Kale, D. Y. A. (2025). Pendidikan Moral Berbasis Pancasila Sebagai Antitesis Perilaku Echo Chamber di Kalangan Mahasiswa PPKn Universitas Khairun. *Haumeni Journal of Education*, *5*(2), 78-86.

yang sebelumnya hanya dibahas dalam ruang formal kini dapat didiskusikan secara terbuka melalui media sosial. Mahasiswa dapat berinteraksi dengan berbagai kelompok masyarakat, tokoh publik, maupun pemerintah untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya keterlibatan warga negara dalam proses demokrasi melalui pemanfaatan teknologi digital.

Namun demikian, perkembangan demokrasi digital juga menghadirkan berbagai tantangan. Kemudahan dalam menyebarkan informasi sering kali disertai dengan munculnya hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, polarisasi politik, serta berbagai bentuk pelanggaran etika digital. Banyak pengguna media sosial yang belum memiliki kemampuan untuk memilah informasi secara kritis sehingga mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar. Selain itu, rendahnya kesadaran mengenai etika digital dapat menyebabkan munculnya konflik sosial yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam konteks tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memberikan pengetahuan mengenai sistem pemerintahan dan hak serta kewajiban warga negara, tetapi juga bertujuan membentuk sikap, nilai, dan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan demokratis. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, mahasiswa dapat dibekali dengan kemampuan berpikir kritis, kesadaran hukum, tanggung jawab sosial, serta kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Di era digital, Pendidikan Kewarganegaraan dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Pembelajaran tidak lagi hanya berfokus pada konsep demokrasi secara teoritis, tetapi juga harus mampu mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menjalankan demokrasi di ruang digital. Mahasiswa perlu memahami bagaimana menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, menghargai perbedaan pendapat, menghindari penyebaran informasi palsu, serta memanfaatkan teknologi untuk mendorong partisipasi publik yang konstruktif[4].

Selain itu, Pendidikan Kewarganegaraan juga berperan dalam memperkuat konsep kewarganegaraan digital (digital citizenship). Kewarganegaraan digital menekankan pentingnya kemampuan individu untuk menggunakan teknologi secara etis, bertanggung jawab, dan produktif. Melalui penguatan kewarganegaraan digital, mahasiswa diharapkan mampu menjadi warga negara yang tidak hanya aktif dalam ruang digital, tetapi juga memiliki komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan persatuan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki posisi strategis sebagai sarana penguatan demokrasi digital di kalangan mahasiswa. Dengan pembelajaran yang tepat, mahasiswa dapat menjadi generasi yang mampu memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung kehidupan demokrasi yang

[4] Mutmainnah, F., Sugara, H., & Prayetno, D. (2025). Penguatan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Mahasiswa Era Digital di Universitas Kahuripan Kediri. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, *15*(2), 53-58.

sehat, partisipatif, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, kajian mengenai peran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana penguatan demokrasi digital di kalangan mahasiswa menjadi penting untuk dilakukan guna mendukung terwujudnya masyarakat demokratis di era digital.

KAJIAN TEORI

Demokrasi Digital

Demokrasi digital merupakan bentuk perkembangan praktik demokrasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pemerintahan. Kehadiran teknologi digital telah mengubah pola hubungan antara masyarakat dengan pemerintah, terutama dalam memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, serta berpartisipasi dalam berbagai aktivitas demokrasi. Melalui media digital, masyarakat tidak lagi hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga dapat menjadi produsen dan penyebar informasi yang berkontribusi terhadap pembentukan opini publik.

Salah satu karakteristik utama demokrasi digital adalah kemudahan akses terhadap informasi publik. Internet memungkinkan masyarakat memperoleh informasi mengenai kebijakan, program, dan kinerja pemerintah secara lebih cepat dan luas. Selain itu, demokrasi digital mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas, karena warga negara dapat menyampaikan pendapat, kritik, saran, maupun aspirasi tanpa harus selalu hadir secara langsung dalam forum pemerintahan. Kondisi tersebut juga menciptakan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, sehingga pemerintah memiliki ruang yang lebih besar untuk mendengarkan kebutuhan dan merespons persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Karakteristik lainnya adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Pemanfaatan platform digital dapat membantu masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Teknologi juga dapat dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan, misalnya melalui konsultasi publik, survei daring, petisi digital, dan berbagai bentuk partisipasi elektronik lainnya. Dengan demikian, demokrasi digital memiliki potensi untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan masyarakat.

Namun, penerapan demokrasi digital juga menghadapi berbagai tantangan, seperti penyebaran berita palsu, ujaran kebencian, manipulasi informasi, serta rendahnya literasi digital. Oleh karena itu, keberhasilan demokrasi digital tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga pada kemampuan masyarakat menggunakannya secara kritis, bijaksana, etis, dan bertanggung jawab. Penguatan literasi digital menjadi penting agar teknologi benar-benar dapat digunakan untuk memperluas partisipasi sekaligus memperkuat kehidupan demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila (Mutmainnah, Sugara, & Prayetno, 2025).

Kewarganegaraan Digital (Digital Citizenship)

Kewarganegaraan digital merupakan kemampuan individu dalam menggunakan teknologi digital secara aman, etis, bertanggung jawab, dan produktif dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini berkembang seiring dengan semakin luasnya penggunaan internet, media sosial, dan berbagai platform digital dalam aktivitas sosial, pendidikan, ekonomi, maupun politik. Kewarganegaraan digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam mengoperasikan perangkat

teknologi, tetapi juga mencakup kesadaran untuk menggunakan teknologi secara tepat dengan memperhatikan norma sosial, etika, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Kewarganegaraan digital memiliki beberapa aspek penting. Pertama, literasi digital, yaitu kemampuan untuk mencari, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi digital secara kritis. Kemampuan ini sangat penting bagi mahasiswa agar tidak mudah terpengaruh oleh berita palsu, informasi yang menyesatkan, maupun konten yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, etika digital, yaitu kemampuan berperilaku secara sopan, menghargai orang lain, dan menghindari tindakan seperti penghinaan, perundungan, penyebaran kebencian, serta penyebaran informasi pribadi tanpa izin.

Ketiga, keamanan digital, yang berkaitan dengan kemampuan melindungi data pribadi, akun, identitas, dan perangkat dari berbagai ancaman di ruang digital. Keempat, komunikasi digital, yaitu kemampuan menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif serta menghargai perbedaan pendapat. Kelima, hak dan tanggung jawab digital, yang menekankan bahwa setiap pengguna memiliki hak untuk memperoleh informasi dan menyampaikan pendapat, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak orang lain. Keenam, partisipasi digital, yaitu keterlibatan masyarakat dalam berbagai aktivitas sosial dan demokrasi melalui teknologi digital.

Bagi mahasiswa, kompetensi kewarganegaraan digital memiliki peranan penting dalam membentuk perilaku yang bertanggung jawab di ruang digital. Mahasiswa yang memiliki kompetensi tersebut mampu memanfaatkan media digital untuk memperoleh pengetahuan, membangun komunikasi, menyampaikan aspirasi, serta berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi secara konstruktif. Dengan demikian, kewarganegaraan digital dapat menjadi salah satu landasan penting dalam membentuk generasi muda yang kritis, beretika, produktif, dan mampu menggunakan teknologi tanpa mengabaikan norma sosial maupun hukum.

Partisipasi Politik Mahasiswa di Era Digital

Partisipasi politik merupakan keterlibatan warga negara dalam berbagai kegiatan yang bertujuan memengaruhi proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi politik menjadi salah satu unsur penting dalam kehidupan demokrasi karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, mengawasi kebijakan pemerintah, serta turut menentukan arah pembangunan. Dalam konteks mahasiswa, partisipasi politik tidak hanya menunjukkan kepedulian terhadap persoalan politik, tetapi juga mencerminkan kesadaran sebagai warga negara yang memiliki hak dan tanggung jawab dalam kehidupan demokratis.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan terhadap bentuk dan pola partisipasi politik. Jika sebelumnya mahasiswa lebih banyak berpartisipasi melalui kegiatan konvensional seperti diskusi, organisasi kemahasiswaan, seminar, demonstrasi, maupun forum publik, saat ini partisipasi tersebut dapat dilakukan melalui media sosial dan berbagai platform digital. Ruang digital memungkinkan mahasiswa menyampaikan pandangan secara lebih cepat, luas, dan terbuka kepada masyarakat. Kondisi ini menjadikan media digital sebagai salah satu ruang baru dalam membangun komunikasi politik dan memperkuat keterlibatan generasi muda dalam kehidupan demokrasi.

Bentuk partisipasi politik digital mahasiswa dapat dilakukan melalui berbagai aktivitas. Mahasiswa dapat menyampaikan opini melalui media sosial, mengikuti kampanye sosial dan politik secara daring, serta menandatangani petisi online sebagai bentuk dukungan terhadap suatu isu atau kebijakan. Selain itu, mahasiswa dapat mengikuti diskusi publik digital, webinar, maupun forum daring untuk bertukar gagasan mengenai berbagai persoalan sosial dan politik. Mahasiswa juga dapat berperan dalam mengawasi kebijakan pemerintah melalui platform digital, misalnya dengan memanfaatkan informasi publik dan menyampaikan kritik atau masukan secara konstruktif.

Meskipun memberikan ruang partisipasi yang lebih luas, partisipasi politik digital juga memiliki tantangan. Penyebaran informasi palsu, provokasi, ujaran kebencian, dan manipulasi opini dapat memengaruhi kualitas partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, mahasiswa perlu memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya serta menyampaikan pendapat dengan mengedepankan etika, argumentasi yang rasional, dan penghormatan terhadap perbedaan. Dengan demikian, partisipasi politik digital dapat menjadi sarana strategis bagi mahasiswa untuk memperkuat kehidupan demokrasi sekaligus membangun budaya politik yang kritis, bertanggung jawab, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Penguatan Demokrasi Digital

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam memperkuat demokrasi digital di kalangan mahasiswa. Melalui pembelajaran PKn, mahasiswa dibekali dengan kemampuan berpikir kritis, kesadaran hukum, literasi digital, serta pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Selain itu, PKn berperan dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan berpendapat, toleransi, persamaan hak, musyawarah, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan penting dalam pelaksanaan demokrasi digital yang sehat dan beretika.

Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi sarana yang efektif untuk membentuk mahasiswa sebagai warga negara digital yang aktif, kritis, bertanggung jawab, dan mampu berpartisipasi secara konstruktif dalam kehidupan demokrasi di era digital.

PEMBAHASAN

Aktivitas Politik Mahasiswa di Media Sosial

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola partisipasi politik masyarakat, termasuk di kalangan mahasiswa. Jika pada masa sebelumnya aktivitas politik lebih banyak dilakukan melalui organisasi kemahasiswaan, diskusi tatap muka, seminar, maupun demonstrasi, saat ini media sosial menjadi salah satu sarana utama bagi mahasiswa untuk terlibat dalam berbagai aktivitas politik. Kehadiran media sosial memberikan ruang yang lebih luas bagi mahasiswa untuk memperoleh informasi politik, menyampaikan pendapat, serta berpartisipasi dalam berbagai isu yang berkembang di masyarakat[5].

[5] Gufron, A. R. Menakar Budaya Demokrasi Digital: Analisis Kesiapan Mahasiswa sebagai Digital Citizen yang Kritis dan Bertanggung Jawab.

Media sosial memungkinkan mahasiswa mengakses berbagai informasi politik secara cepat dan mudah. Berita mengenai kebijakan pemerintah, pemilihan umum, isu sosial, hingga perkembangan politik internasional dapat diperoleh hanya melalui telepon genggam yang terhubung dengan internet. Kemudahan ini membuat mahasiswa lebih aktif mengikuti perkembangan politik dibandingkan dengan generasi sebelumnya yang memiliki keterbatasan akses informasi.

Selain sebagai sumber informasi, media sosial juga menjadi sarana bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat mereka terhadap berbagai kebijakan publik. Melalui unggahan, komentar, maupun diskusi daring, mahasiswa dapat memberikan kritik, saran, maupun dukungan terhadap suatu kebijakan yang dianggap berdampak bagi masyarakat. Aktivitas tersebut menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi ruang publik baru yang memungkinkan terjadinya interaksi antara masyarakat dan pemerintah secara lebih terbuka.

Mahasiswa juga sering memanfaatkan media sosial untuk melakukan kampanye sosial dan politik. Berbagai gerakan yang berkaitan dengan pendidikan, lingkungan, hak asasi manusia, antikorupsi, maupun isu kemanusiaan banyak dipromosikan melalui platform digital. Kampanye tersebut biasanya dilakukan dengan membagikan informasi, membuat petisi daring, atau mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan tertentu. Aktivitas ini menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai isu publik[6].

Selain itu, media sosial juga mempermudah mahasiswa dalam membangun jaringan dan kerja sama dengan berbagai kelompok masyarakat. Mahasiswa dapat berinteraksi dengan akademisi, aktivis, tokoh masyarakat, maupun lembaga pemerintahan untuk berdiskusi mengenai berbagai persoalan yang dihadapi bangsa. Interaksi tersebut memperluas wawasan politik mahasiswa dan meningkatkan kesadaran mereka terhadap pentingnya partisipasi dalam kehidupan demokrasi.

Namun demikian, aktivitas politik mahasiswa di media sosial tidak selalu memberikan dampak positif. Kemudahan dalam mengakses dan menyebarkan informasi sering kali menyebabkan munculnya berbagai informasi yang tidak akurat atau bahkan hoaks. Sebagian mahasiswa terkadang menyebarkan informasi politik tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Akibatnya, media sosial dapat menjadi sarana penyebaran disinformasi yang berpotensi memengaruhi opini publik secara negatif[7].

Oleh karena itu, aktivitas politik mahasiswa di media sosial perlu diimbangi dengan kemampuan literasi digital dan sikap kritis dalam menerima informasi. Mahasiswa harus mampu memanfaatkan media sosial sebagai sarana partisipasi politik yang

[6] Karomah, S. (2025). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mengembangkan Karakter Mahasiswa Di Era Digital (Studi Kasus Mahasiswa Pendidkan Bahasa Indonesia Semester 2 TA. 2025/2026). *Jurnal Ilmu Pendidikan*, *4*(1), 47-58.

[7] Yuniarto, B., Ismiati, F., & Putri, I. Y. (2025). Peran Media Sosial dalam Membentuk Kesadaran Konstitusi di Kalangan Mahasiswa: Studi Kasus pada Gerakan Mahasiswa dalam Mengkritisi Kebijakan Pemerintah. *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, *5*(2), 166-177.

konstruktif dan bertanggung jawab sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.

Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Partisipasi Digital

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kesadaran dan partisipasi mahasiswa dalam kehidupan demokrasi digital. Melalui pembelajaran PKn, mahasiswa memperoleh pengetahuan mengenai hak dan kewajiban warga negara, sistem politik, demokrasi, konstitusi, serta berbagai nilai yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengetahuan tersebut menjadi bekal bagi mahasiswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam ruang digital.

Salah satu pengaruh utama PKn terhadap partisipasi digital adalah meningkatnya pemahaman mahasiswa mengenai pentingnya keterlibatan dalam kehidupan publik. Mahasiswa yang memperoleh pendidikan kewarganegaraan dengan baik cenderung memiliki kesadaran yang lebih tinggi untuk mengikuti perkembangan isu sosial dan politik yang terjadi di masyarakat. Kesadaran tersebut mendorong mereka untuk aktif mencari informasi, berdiskusi, dan memberikan pendapat melalui media digital.

PKn juga berperan dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa diajak untuk menganalisis berbagai permasalahan sosial dan politik dari berbagai sudut pandang. Kemampuan berpikir kritis ini sangat penting dalam era digital karena mahasiswa dihadapkan pada arus informasi yang sangat besar dan beragam. Dengan kemampuan tersebut, mahasiswa dapat membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar sebelum mengambil sikap atau menyebarkannya kepada orang lain[8].

Selain itu, PKn berkontribusi dalam membentuk karakter demokratis mahasiswa. Nilai-nilai seperti toleransi, penghormatan terhadap perbedaan pendapat, tanggung jawab, dan musyawarah diajarkan dalam pembelajaran PKn. Nilai-nilai tersebut sangat relevan dalam kehidupan digital yang ditandai oleh interaksi dengan berbagai kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang dan pandangan yang berbeda. Mahasiswa yang memiliki karakter demokratis akan lebih mampu berpartisipasi secara positif dalam diskusi publik di media sosial.

Pengaruh lain dari PKn adalah meningkatnya kesadaran mahasiswa mengenai etika digital. Dalam era demokrasi digital, kebebasan berpendapat harus diimbangi dengan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi. Melalui PKn, mahasiswa diajarkan untuk menghormati hak orang lain, menghindari ujaran kebencian, serta menggunakan media sosial secara bijaksana. Kesadaran etika ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan digital yang sehat dan kondusif bagi perkembangan demokrasi.

Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas partisipasi digital mahasiswa. Mahasiswa tidak

[8] Saputra, E. (2025). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Pendidikan Tinggi: Membangun Karakter Bangsa serta Tantangan Kontemporer*. PT Mafy Media Literasi Indonesia.

hanya menjadi pengguna teknologi yang aktif, tetapi juga menjadi warga negara digital yang kritis, bertanggung jawab, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan demokrasi.

Tantangan Demokrasi Digital

Meskipun demokrasi digital menawarkan berbagai peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaannya. Tantangan-tantangan tersebut dapat memengaruhi kualitas demokrasi dan menghambat terciptanya ruang digital yang sehat dan produktif.

Salah satu tantangan utama demokrasi digital adalah penyebaran hoaks dan disinformasi. Media sosial memungkinkan informasi menyebar dengan sangat cepat tanpa melalui proses verifikasi yang memadai. Akibatnya, masyarakat sering kali menerima informasi yang tidak benar dan menjadikannya sebagai dasar dalam mengambil keputusan atau membentuk opini. Penyebaran hoaks dapat menimbulkan kebingungan, konflik sosial, dan menurunkan kualitas partisipasi demokratis[9].

Tantangan berikutnya adalah polarisasi politik. Algoritma media sosial cenderung menampilkan informasi yang sesuai dengan minat dan pandangan pengguna. Kondisi ini menyebabkan pengguna hanya terpapar pada informasi yang mendukung pandangan mereka sendiri dan mengurangi kesempatan untuk memahami perspektif yang berbeda. Akibatnya, masyarakat menjadi semakin terpolarisasi dan sulit mencapai kesepahaman dalam berbagai isu publik.

Selain itu, rendahnya literasi digital juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan demokrasi digital. Tidak semua mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengevaluasi informasi secara kritis. Banyak pengguna media sosial yang mudah percaya terhadap informasi yang beredar tanpa memeriksa sumber dan kebenarannya. Kondisi ini meningkatkan risiko penyebaran hoaks dan manipulasi informasi.

Tantangan lainnya adalah maraknya ujaran kebencian dan perilaku tidak etis di media sosial. Kebebasan berpendapat yang diberikan oleh ruang digital sering kali disalahgunakan untuk menyerang individu atau kelompok tertentu. Ujaran kebencian dapat merusak hubungan sosial, menimbulkan konflik, dan mengancam persatuan masyarakat.

Masalah keamanan dan privasi data juga menjadi perhatian dalam demokrasi digital. Banyak pengguna internet yang belum memahami pentingnya melindungi data pribadi mereka. Penyalahgunaan data dapat digunakan untuk memengaruhi perilaku politik masyarakat atau bahkan mengancam hak-hak individu sebagai warga negara.

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran yang sangat penting. Melalui penguatan literasi digital, etika digital, dan pemahaman mengenai nilai-nilai demokrasi, mahasiswa dapat dibekali dengan kemampuan untuk menghadapi berbagai permasalahan yang muncul dalam ruang digital.

[9] Amiarti, R. D. TANTANGAN LITERASI POLITIK DIGITAL DALAM MEWUJUDKAN PENDIDIKAN POLITIK YANG EFEKTIF BAGI MAHASISWA DI ERA DOMINASI MEDIA SOSIAL.

Dengan demikian, demokrasi digital dapat berkembang secara sehat dan memberikan manfaat yang optimal bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Secara keseluruhan, aktivitas politik mahasiswa di media sosial menunjukkan meningkatnya partisipasi generasi muda dalam kehidupan demokrasi. Pendidikan Kewarganegaraan berkontribusi dalam membentuk partisipasi digital yang berkualitas melalui pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan karakter kewarganegaraan. Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam demokrasi digital, penguatan Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi salah satu solusi penting dalam menciptakan warga negara digital yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola partisipasi politik mahasiswa. Media sosial menjadi sarana yang efektif bagi mahasiswa untuk memperoleh informasi politik, menyampaikan pendapat, mengikuti diskusi publik, serta terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan politik. Kondisi ini menunjukkan bahwa demokrasi digital telah membuka ruang yang lebih luas bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi.

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung penguatan demokrasi digital di kalangan mahasiswa. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, mahasiswa memperoleh pengetahuan mengenai hak dan kewajiban warga negara, nilai-nilai demokrasi, kesadaran hukum, serta kemampuan berpikir kritis yang diperlukan dalam menghadapi arus informasi digital. Selain itu, Pendidikan Kewarganegaraan juga berperan dalam membentuk karakter demokratis dan etika digital sehingga mahasiswa dapat menggunakan media sosial secara bertanggung jawab.

Meskipun demokrasi digital memberikan berbagai peluang bagi peningkatan partisipasi masyarakat, terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi, seperti penyebaran hoaks, disinformasi, polarisasi politik, rendahnya literasi digital, ujaran kebencian, dan masalah keamanan data pribadi. Tantangan tersebut dapat mengurangi kualitas partisipasi demokratis apabila tidak diatasi dengan baik.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk memperkuat Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana pengembangan literasi digital, etika digital, dan kesadaran demokrasi di kalangan mahasiswa. Dengan penguatan tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menjadi warga negara digital yang aktif, kritis, cerdas, bertanggung jawab, serta mampu berkontribusi secara positif dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat, inklusif, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Amiarti, R. D. TANTANGAN LITERASI POLITIK DIGITAL DALAM MEWUJUDKAN PENDIDIKAN POLITIK YANG EFEKTIF BAGI MAHASISWA DI ERA DOMINASI MEDIA SOSIAL.

Mutmainnah, F., Sugara, H., & Prayetno, D. (2025). Penguatan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Mahasiswa Era Digital di Universitas Kahuripan Kediri. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 15(2), 53-58.

Mutmainnah, F., Sugara, H., & Prayetno, D. (2025). Penguatan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Mahasiswa Era Digital di Universitas Kahuripan Kediri. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, *15*(2), 53-58.

Gufron, A. R. Menakar Budaya Demokrasi Digital: Analisis Kesiapan Mahasiswa sebagai Digital Citizen yang Kritis dan Bertanggung Jawab.

Karomah, S. (2025). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mengembangkan Karakter Mahasiswa Di Era Digital (Studi Kasus Mahasiswa Pendidkan Bahasa Indonesia Semester 2 TA. 2025/2026). Jurnal Ilmu Pendidikan, 4(1), 47-58.

Yuniarto, B., Ismiati, F., & Putri, I. Y. (2025). Peran Media Sosial dalam Membentuk Kesadaran Konstitusi di Kalangan Mahasiswa: Studi Kasus pada Gerakan Mahasiswa dalam Mengkritisi Kebijakan Pemerintah. PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 5(2), 166-177.

Nurmansyah, C. A., Juwono, M. P., & Khairiyah, N. (2026). Literasi Digital Dan Transformasi Kesadaran Kewarganegaraan Mahasiswa Dalam Ekosistem Demokrasi Digital. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(2), 6880-6891.

Kothen, S. T. G., Sae, B. S., Ora, I. S., & Toga, T. K. H. (2025). Penguatan literasi kewarganegaraan melalui pendidikan politik di kalangan mahasiswa PPKn. *Paedagogie*, *20*(2), 383-392.

Wibowo, I., Noe, W., Mas' ud, F., & Kale, D. Y. A. (2025). Pendidikan Moral Berbasis Pancasila Sebagai Antitesis Perilaku Echo Chamber di Kalangan Mahasiswa PPKn Universitas Khairun. *Haumeni Journal of Education*, *5*(2), 78-86.

Gufron, A. R. Menakar Budaya Demokrasi Digital: Analisis Kesiapan Mahasiswa sebagai Digital Citizen yang Kritis dan Bertanggung Jawab.

Karomah, S. (2025). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mengembangkan Karakter Mahasiswa Di Era Digital (Studi Kasus Mahasiswa Pendidkan Bahasa Indonesia Semester 2 TA. 2025/2026). *Jurnal Ilmu Pendidikan*, *4*(1), 47-58.

Yuniarto, B., Ismiati, F., & Putri, I. Y. (2025). Peran Media Sosial dalam Membentuk Kesadaran Konstitusi di Kalangan Mahasiswa: Studi Kasus pada Gerakan Mahasiswa dalam Mengkritisi Kebijakan Pemerintah. *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, *5*(2), 166-177.